

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Jakarta 2010



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Jakarta 2010

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk unit kerja di bawahnya, untuk menyiapkan rencana strategis unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), selaku Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian perlu menyusun “Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian”, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Kontrak Kerja Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia.

Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja lingkup BPPSDMP dalam menyusun Renstra masing-masing. Disamping itu, Renstra tersebut diharapkan juga menjadi acuan dalam penetapan program, kegiatan dan anggaran tahunan lingkup BPPSDMP.

Kepala Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian,

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum SDM Pertanian	8
1.1.1. Pelaku Utama	8
1.1.2. Aparatur Pertanian	12
1.2. Potensi	14
1.2.1. Aspek Kelembagaan.....	14
1.2.2. Aspek Ketenagaan.....	15
1.3. Hasil yang Dicapai BPSDMP dalam Tahun 2005-2009	16
1.3.1. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.....	17
1.3.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan.....	17
1.3.1.2. Aspek Kelembagaan.....	18
1.3.1.3. Aspek Ketenagaan	18
1.3.1.4. Aspek Penyelenggaraan.....	18
1.3.2. Reposisi Pelatihan Pertanian	19
1.3.2.1. Aspek Kelembagaan.....	19
1.3.2.2. Aspek Ketenagaan	20
1.3.2.3. Aspek Penyelenggaraan.....	20
1.3.2.4. Aspek Kerjasama.....	20
1.3.3. Reorientasi Pendidikan Pertanian	21
1.3.3.1. Aspek Kelembagaan.....	21
1.3.3.2. Aspek Ketenagaan	21
1.3.3.3. Aspek Penyelenggaraan.....	22
1.3.3.4. Aspek Kerjasama.....	22

1.3.4. Pengembangan Administrasi dan Manajemen.....	23
1.3.4.1. Aspek Perencanaan	23
1.3.4.2. Aspek Keuangan dan Perlengkapan	24
1.3.4.3. Aspek Organisasi dan Kepegawaian	25
1.3.4.4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan	25
1.3.5. Program Koordinatif	25
1.3.5.1. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	25
1.3.5.2. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).....	26
1.3.5.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	27
1.3.6. Program dengan Dana PHLN	27
1.3.6.1. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi Informasi Pertanian/ P3TIP (<i>Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information/ FEATI</i>).....	27
1.3.6.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan Pertanian (<i>Rural Empowerment on Agriculture Development/ READ</i>)..	29
1.3.6.3. Kegiatan dengan Sumber Dana CF-SKR	29
1.4. Permasalahan dan Tantangan.....	30
1.4.1. Permasalahan.....	30
1.4.1.1. Aspek Penyuluhan Pertanian.....	31
1.4.1.2. Aspek Pelatihan Pertanian.....	31
1.4.1.3. Aspek Pendidikan Pertanian.....	32
1.4.1.4. Aspek Administrasi dan Manajemen	33
1.4.2. Tantangan.....	33
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	35
2.1. Visi.....	35
2.2. Misi	36
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	36
2.3.1. Tujuan.....	36
2.3.2. Sasaran	37

2.3.2.1.	Penyuluhan Pertanian.....	37
2.3.2.2.	Pelatihan Pertanian.....	38
2.3.2.3.	Pendidikan Pertanian.....	39
2.3.2.4.	Administrasi dan Manajemen.....	40
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA INDIKATOR.....	41
3.1.	Arah Kebijakan	41
3.2.	Strategi	42
3.3.	Program dan Kegiatan	43
3.3.1.	Program.....	43
3.3.2.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	43
3.3.2.1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	44
3.3.2.2.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	45
3.3.2.3.	Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	46
3.3.2.4.	Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya	48
3.4.	Kegiatan dan Indikator	48
BAB IV	PENUTUP	58



BAB I PENDAHULUAN

Sektor pertanian di masa mendatang diharapkan masih memegang peran strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata bagi 230 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2010 - 2014 telah menetapkan visi pembangunan pertanian, yaitu **“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”**.

Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan kesejahteraan petani.

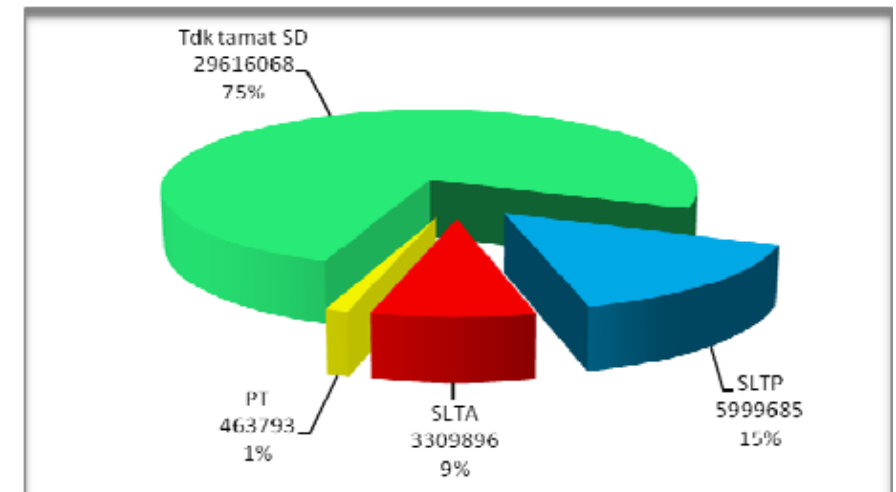
Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Untuk itu, penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian perlu terus dikembangkan dan dimantapkan untuk menyiapkan aparatur yang kompeten, visioner, serta memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan pertanian.

Di samping itu, kegiatan penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian juga ditujukan untuk: 1) memperkuat kelembagaan petani, 2) memberdayakan usaha petani, dan 3) mewujudkan pelaku utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wirausaha, berdaya saing, dan berwawasan global. Hal ini dimaksudkan agar pelaku utama pembangunan pertanian mampu bersaing, baik di pasar regional maupun di pasar global.

1.1. Kondisi Umum SDM Pertanian

Sumberdaya manusia pertanian, sebagai pelaku utama dan aparatur pertanian, memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian. Kondisi umum dari pelaku utama dan aparatur pertanian secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

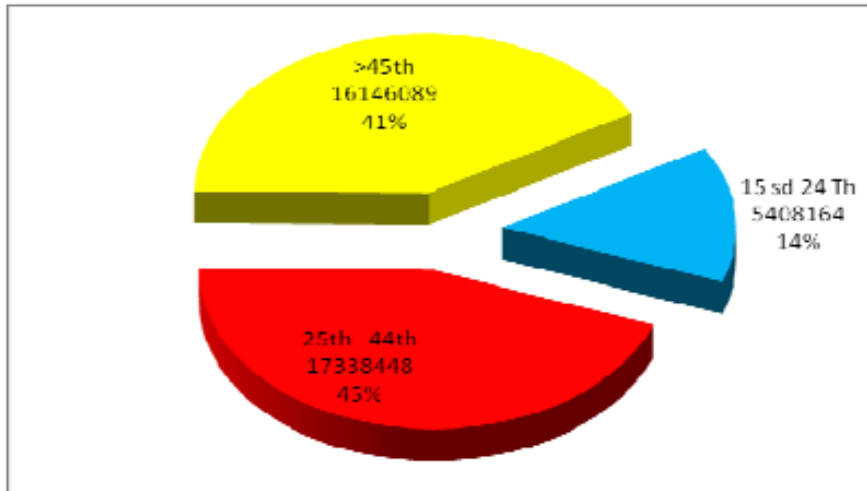
1.1.1. Pelaku Utama



Gambar 1. Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan latar belakang pendidikan

Gambar1 menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, pelaku utama pembangunan pertanian (petani) berjumlah 39.389.442 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan SD dan tidak tamat SD sebanyak 29.616.068 orang (75,19%), tamat SLTP sebanyak 5.999.685 orang (15,23%), tamat SLTA sebanyak 3.309.896 orang (8,40%), tamat Perguruan Tinggi (diploma dan sarjana) sebanyak 463.793 orang (1,18%).

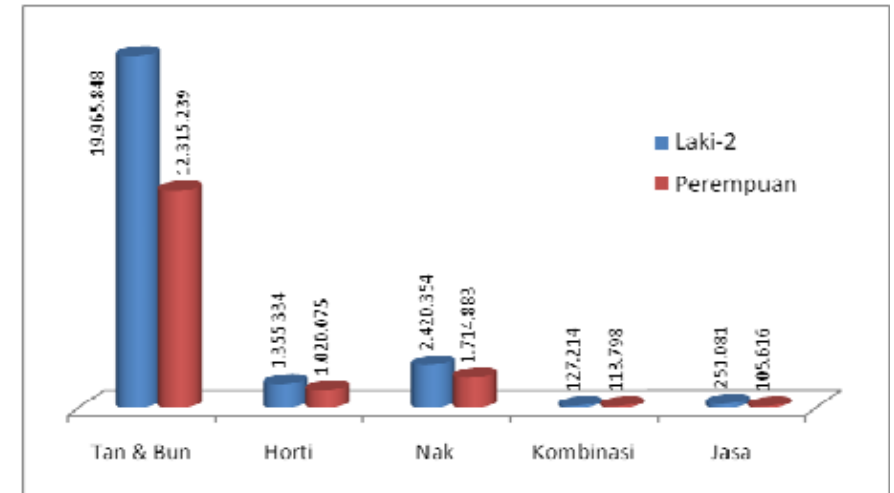
Berdasarkan sebaran umur, seperti terlihat pada Gambar 2, pelaku utama yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun sebanyak 5.408.164 orang (13,91%), usia 25 sampai dengan 44 tahun sebanyak 17.338.448 orang (44,58%), usia di atas 45 tahun sebanyak 16.146.089 orang (41,51%).



Gambar 2. Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan sebaran umur

Selanjutnya, berdasarkan jenis usaha, seperti terlihat pada Gambar3, pelaku utama yang berusaha di sub sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan berjumlah 32.281.087 orang (81,95%), sub sektor Peternakan berjumlah 4.135.237 orang (10.50%), sub sektor Hortikultura berjumlah 2.375.409 orang

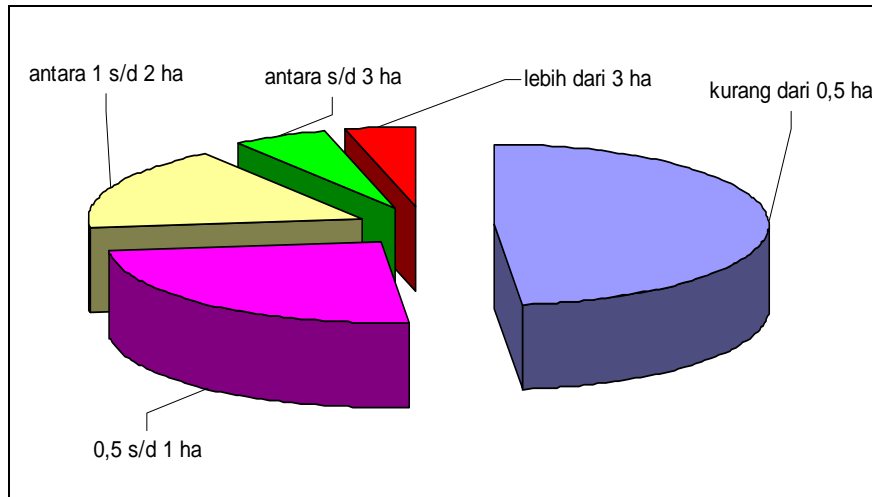
(6,03%), sub sektor kombinasi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berjumlah 241.012 orang (0.61%), dan sub sektor Jasa Pertanian, Perkebunan, Peternakan berjumlah 241.012 orang (0.91%).



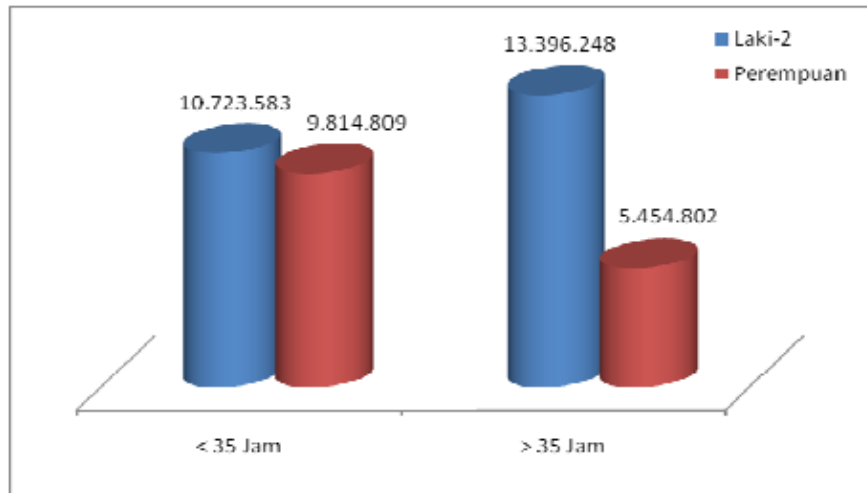
Gambar 3. Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan jenis usaha/sub sektor pertanian

Berdasarkan kepemilikan lahan, pelaku utama sub sektor Tanaman Pangan yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha sebanyak 43,53%, antara 0,5 sampai dengan 1 ha sebanyak 22,74%, antara 1 sampai dengan 2 ha sebanyak 15,27%, antara 2 sampai dengan 3 ha sebanyak 5,04%, dan lebih dari 3 ha sebanyak 3,65%¹⁾, seperti terlihat pada Gambar 4. Sedangkan berdasarkan curahan waktu bekerja, pelaku utama yang bekerja di bawah 35 jam per minggu sebanyak 20.538.392 orang (52,14%), dan yang bekerja di atas 35 jam per minggu sebanyak 18.851.050 orang (47,86%), seperti terlihat pada Gambar 5.

¹⁾ Sumber: Koran Kompas, 26 April 2010



Gambar 4. Pelaku utama sub sektor tanaman pangan berdasarkan kepemilikan lahan

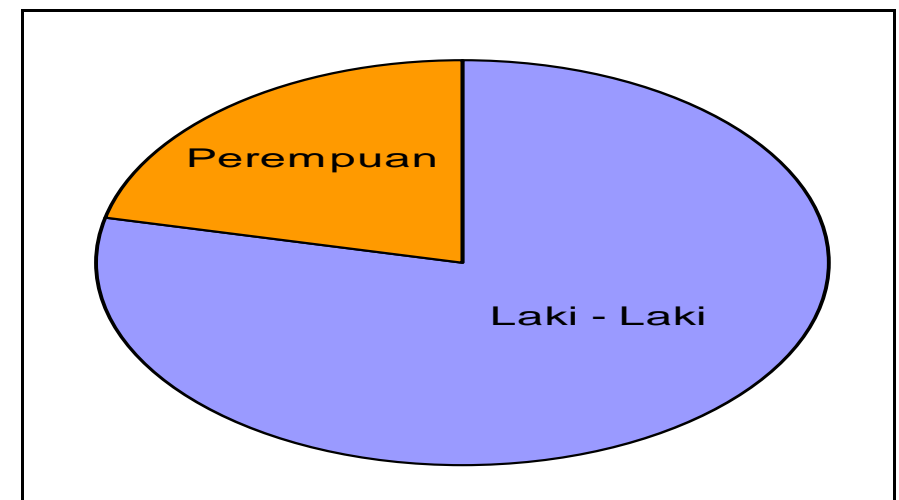


Gambar 5. Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan curahan waktu bekerja

Ditinjau dari aspek gender, jumlah laki-laki yang bekerja di bawah 35 jam per minggu sebanyak 10.723.583 orang (44,46%) dan perempuan sebanyak 9.814.809 orang (64,28%). Sementara itu jumlah laki-laki yang bekerja di atas 35 jam per minggu sebanyak 13.396.248 orang (55,54%), perempuan sebanyak 5.454.802 orang (35,72%).

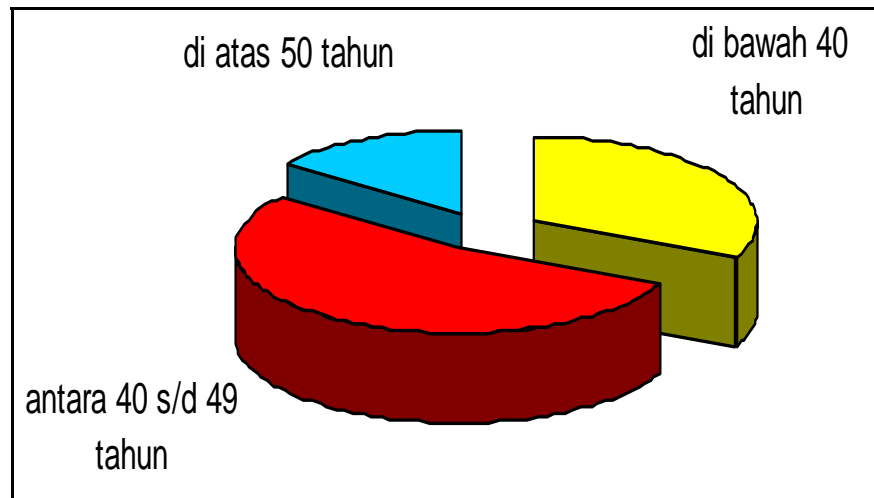
1.1.2. Aparatur Pertanian

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur yang berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamisator. Aparatur pertanian yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan pertanian adalah: 1) perumus kebijakan, 2) perencana pembangunan, 3) tenaga manajemen dan administrasi, 4) peneliti pertanian, 5) widyaiswara, dosen, guru, dan instruktur, 6) tenaga penyuluh pertanian dan fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) lainnya, 7) tenaga karantina pertanian, dan 8) tenaga fungsional lainnya.



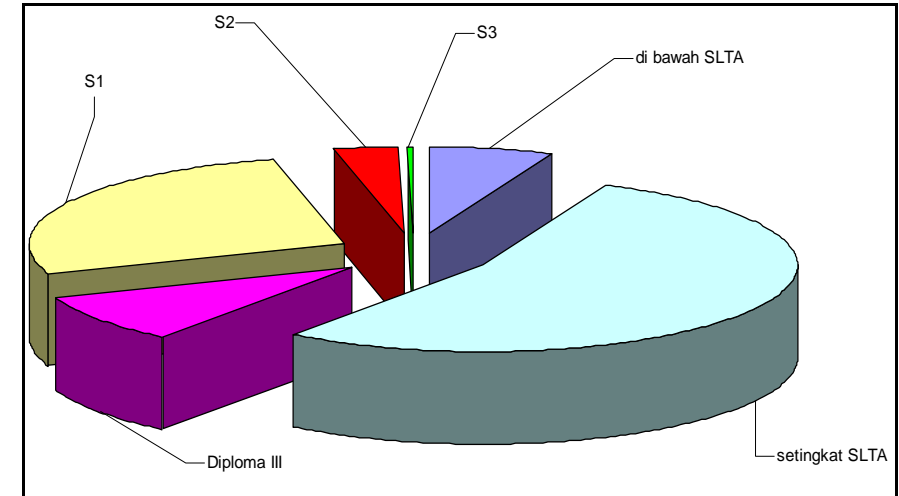
Gambar 6. Aparatur pertanian berdasarkan jenis kelamin

Seperti terlihat pada Gambar 6, berdasarkan hasil pengkajian tentang profil aparatur pertanian tahun 2008, jumlah aparatur pertanian sebanyak 96.647 orang, yang terdiri atas 76.009 orang laki-laki (78,59%) dan 20.638 orang perempuan (21,41%). Sedangkan berdasarkan sebaran usia, seperti terlihat pada Gambar 7, aparatur pertanian yang berusia di bawah 40 tahun sebanyak 32%, antara 40 sampai dengan 49 tahun sebanyak 53,45% dan usia di atas 50 tahun sebanyak 14,55%.



Gambar 7. Aparatur pertanian berdasarkan usia

Ditinjau dari tingkat pendidikan, seperti terlihat pada Gambar 8, aparatur pertanian yang berpendidikan dibawah SLTA sebanyak 6,38 %, setingkat SLTA sebanyak 53,97%, Diploma III sebanyak 9,00%, S1 sebanyak 27,11%, S2 sebanyak 3,14% dan S3 sebanyak 0,40%.



Gambar 8. Aparatur pertanian berdasarkan tingkat pendidikan.

1.2. Potensi

1.2.1. Aspek Kelembagaan

Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai salah satu eselon I di lingkup Kementerian Pertanian memiliki empat unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, dan Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian.

Disamping organisasi yang ada di pusat, Badan Pengembangan SDM Pertanian memiliki sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang, STPP Gowa, STPP Manokwari, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Sembawa, SPP Negeri Banjarbaru, dan SPP Negeri Kupang.

Selain UPT Pendidikan, Badan Pengembangan SDM Pertanian memiliki 10 UPT Pelatihan, yaitu: Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, BBPP Ketandan, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Balai Besar Pelatihan Peternakan Noelbaki, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi, dan BPP Lampung.

Potensi lain yang melaksanakan fungsi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian di daerah adalah: STPP Aceh; 71 SPP yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta; 19 Balai Diklat Pertanian Daerah (BDP); 14 Badan Koordinasi Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan; 12 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi; 7 dinas lingkup pertanian tingkat provinsi yang menangani penyuluhan pertanian; 129 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 151 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kab/Kota. Di samping itu terdapat 212 dinas lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota yang menangani penyuluhan pertanian, dan 3.953 Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan (dari 5.324 kecamatan).

Kelembagaan pelatihan di tingkat desa yang melaksanakan fungsi pelatihan dan permagangan bagi petani adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Pada saat ini di seluruh Indonesia terdapat 708 P4S.

1.2.2. Aspek Ketenagaan

Jumlah aparatur Badan Pengembangan SDM Pertanian di tingkat Pusat dan UPT adalah sebanyak 2.285 orang, dengan latar belakang pendidikan: sampai dengan SLTA sebanyak 1.122 orang (49,1%), Diploma III sebanyak 112 orang (4,9%), S1/D4 sebanyak 672 orang (29,41%), S2 sebanyak 352 orang (15,4%), dan S3 sebanyak 27 orang (1,18%).

Tenaga fungsional di bidang pelatihan dan pendidikan yang dimiliki dan dibina oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian terdiri atas: 290 orang

widyaiswara, 227 orang dosen, dan 553 orang guru SPP. Selain tenaga fungsional, Badan Pengembangan SDM Pertanian juga memiliki tenaga kediklatan sebanyak 790 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 427 orang.

Tenaga fungsional penyuluh pertanian yang dimiliki dan dibina oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian terdiri atas: Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 27.922 orang. Selain itu terdapat Penyuluh Pertanian Honorer sebanyak 1.251 orang, Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 8.017 orang, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 24.608 orang.

1.3. Hasil yang Dicapai BPSDMP dalam Tahun 2005-2009

Pada periode tahun 2005 – 2009, Badan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan empat Program Aksi, yaitu: 1) Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, 2) Reposisi Pelatihan Pertanian, 3) Reorientasi Pendidikan Pertanian, dan 4) Pengembangan Administrasi dan Manajemen SDM Pertanian.

Di samping itu, Badan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Tani dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), yaitu: Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian/ P3TIP (*Loan Bank Dunia*), Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian (*Loan IFAD*), Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Pasca Gempa dan P4S (*Grant Counterpart Fund-Second Kennedy Round*).

Selain Program Aksi dan Program Pemberdayaan Masyarakat Petani, Badan Pengembangan SDM Pertanian juga ditugasi untuk melaksanakan Program Koordinatif, yaitu: Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Program Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dan Program Agropolitan.

1.3.1. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

1.3.1.1. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 165 /Kpts/OT.160/12/2008, tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 25/Permentan/OT.140/ 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/ 1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP.

1.3.1.2. Aspek Kelembagaan

- Terbentuknya 14 (empat belas) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta 12 (dua belas) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di tingkat Provinsi. Di samping itu terdapat 7 (tujuh) dinas lingkup pertanian tingkat provinsi yang menangani penyuluhan pertanian.
- Terbentuknya 129 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan 151 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kab/Kota. Di samping itu terdapat 212 dinas lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota yang menangani penyuluhan pertanian.
- Terbentuknya 3.953 Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan dari 5.324 kecamatan.
- Terbentuknya 274.229 Poktan dan 28.304 Gapoktan.

1.3.1.3. Aspek Ketenagaan

- Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 29.922 Penyuluh Pertanian PNS.
- Terlaksananya rekrutmen dan penempatan 24.608 orang Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian.

1.3.1.4. Aspek Penyelenggaraan

- Tersusun dan terdistribusikannya materi penyuluhan pertanian dalam berbagai media cetak (87 judul leaflet, 69 judul liptan, 6 judul brosur) dan elektronik (74 episode siaran TV, 3 judul iklan layanan masyarakat, 82 episode siaran radio)
- Terdistribusikannya 1.000 unit telepon genggam dan 6.692 unit kendaraan roda dua untuk penyuluh pertanian.

- Terdistribusikannya empat unit mobil penyuluhan pertanian untuk tiga Badan Koordinasi Penyuluhan (Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan), dan PPMKP Ciawi.
- Terdistribusikannya 168.000 buah buku kerja bagi penyuluh pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Terlaksananya pengembangan 531 unit BPP Model pada 440 kabupaten/kota di 33 provinsi.
- Terdistribusi Tabloid Sinar Tani sebanyak 3.996.624 eksemplar bagi penyuluh pertanian PNS.
- Terselenggaranya penganangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banyuasin yang diikuti oleh 1.052 orang penyuluh pertanian.
- Terselenggaranya PENAS XII di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 30.000 petani.
- Terselenggaranya Jambore Penyuluh Pertanian di Guci, Kabupaten Tegal dan Cibodas, Kabupaten Cianjur yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang penyuluh pertanian.

1.3.2. Reposisi Pelatihan Pertanian

1.3.2.1. Aspek Kelembagaan

- Meningkatnya status eselonering Balai Diklat Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut, Binuang, dan Balai Diklat Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering, Noelbaki.
- Berubahnya tupoksi UPT Pelatihan yang berorientasi komoditas menjadi berorientasi agribisnis (8 UPT Pelatihan) dan berorientasi manajemen dan kepemimpinan (1 UPT).
- Berubahnya status kelembagaan UPTD Balai Diklat Pertanian Lampung menjadi UPT Pelatihan Pusat.

- Terfasilitasinya 234 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) baru, dan terbinanya 708 P4S.

1.3.2.2. Aspek Ketenagaan

- Ditetapkannya 66 orang widyaiswara baru, dan meningkatnya profesionalisme 290 widyaiswara UPT Pelatihan Badan Pengembangan SDM Pertanian dan UPT Pelatihan Provinsi.
- Meningkatnya kompetensi 300 orang instruktur/ fasilitator/ pengelola P4S.
- Meningkatnya kompetensi 117 orang tenaga non kediklatan.

1.3.2.3. Aspek Penyelenggaraan

- Terakreditasinya 16 jenis diklat teknis di 9 UPT Pelatihan sesuai keputusan LAN.
- Meningkatnya kompetensi kerja 4.146 orang CPNS melalui Diklat Pra Jabatan.
- Meningkatnya kompetensi kerja 1.059 orang aparatur pertanian melalui Diklat PIM.
- Meningkatnya kompetensi kerja 59.634 orang aparatur pertanian melalui Diklat Teknis Agribisnis dan Diklat Fungsional Pertanian.
- Meningkatnya kompetensi kerja 56.262 orang non aparatur pertanian melalui pelatihan/permagangan di bidang pertanian/agribisnis.

1.3.2.4. Aspek Kerjasama

- Meningkatnya kompetensi kerja 134 orang peserta dari negara-negara di Asia melalui berbagai pelatihan dalam kerangka kerjasama ASEAN.
- Meningkatnya kompetensi kerja 173 orang peserta dari negara-negara di Afrika dan Pasifik melalui berbagai pelatihan dalam

kerangka kerjasama bilateral dengan Jepang/JICA, Sudan, Tanzania, dan Gambia.

- Meningkatnya kompetensi kerja 365 orang peserta dari anggota APEC dan APO melalui berbagai pelatihan dalam kerangka kerjasama multilateral APEC dan APO.
- Meningkatnya kompetensi kerja 247 orang peserta melalui Program Magang Petani Muda Indonesia di Jepang.
- Meningkatnya kapasitas PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BDP Cihea dan 10 P4S dalam penyelenggaraan pelatihan/permagangan internasional.

1.3.3. Reorientasi Pendidikan Pertanian

1.3.3.1. Aspek Kelembagaan

- Ditetapkannya status akreditasi 12 program studi di enam STPP.
- Meningkatnya status akreditasi program studi di 33 SPP UPT Pusat/Pemda/Swasta.
- Ditetapkannya tiga program studi baru di 12 SPP Pemda dan Swasta.
- Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 sampai dengan 48 tahun 2008 tentang penambahan tugas dan fungsi STPP untuk melaksanakan Diklat Fungsional RIHP.

1.3.3.2. Aspek Ketenagaan

- Meningkatnya kompetensi 314 orang guru SPP dan 195 orang dosen STPP melalui pelatihan metodologi dan teknis agribisnis.
- Meningkatnya kompetensi 30 orang dosen STPP sebagai fasilitator diklat melalui Diklat Calon Widyaiswara.

- Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris 60 orang guru SPP dalam rangka persiapan peningkatan status SPP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

1.3.3.3. Aspek Penyelenggaraan

- Dihasilkannya 2.654 orang lulusan 7 STPP.
- Dihasilkannya 13.289 orang lulusan 79 SPP.
- Meningkatnya kompetensi 3.334 orang penyuluh pertanian melalui Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Meningkatnya kompetensi 210 orang POPT melalui Diklat Fungsional POPT.
- Dihasilkannya 25.580 orang calon THL-TB PP melalui Diklat THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Meningkatnya kompetensi 50 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) melalui Diklat Dasar PMHP.
- Dihasilkannya 93 orang calon THL-TB Petugas Karantina Pertanian melalui Diklat pembekalan THL-TB PKP.
- Meningkatnya keterampilan 1.042 orang siswa SPP dan 79 orang mahasiswa STPP di bidang perkebunan berbasis kelapa sawit.
- Meningkatnya kompetensi 205 orang sarjana pertanian melalui *pelatihan dan permagangan (retooling)* di bidang perkebunan berbasis kelapa sawit.
- Tumbuhnya 271 orang wirausahawan muda pertanian alumni SPP dan STPP melalui program bantuan modal usaha.

1.3.3.4. Aspek Kerjasama

- Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan wawasan 15 orang siswa SPP melalui program pertukaran siswa selama satu tahun di sekolah menengah pertanian Gunma, Jepang.

- Meningkatnya keterampilan dan wawasan 10 orang siswa SPP melalui praktek kerja usaha selama satu semester di sekolah menengah pertanian Fukui, Jepang.
- Meningkatnya kompetensi 30 orang alumni SPP melalui program magang usaha pertanian selama satu tahun di Ibaraki, Jepang.
- Terfasilitasinya 13.192 orang siswa SPP dan 1.071 orang mahasiswa STPP untuk menerima Beasiswa Supersemar.
- Meningkatnya kompetensi akademik 137 orang aparatur pertanian melalui program S2, dan 39 orang aparatur pertanian melalui program S3.

1.3.4. Pengembangan Administrasi dan Manajemen

1.3.4.1. Aspek Perencanaan

- Tersusun dan terdistribusikannya Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPSDMP setiap tahun, masing-masing tahun sebanyak 1.000 eksemplar.
- Tersusun dan tercetaknya dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) setiap tahun, sejumlah satuan kerja lingkup BPSDMP.
- Tersusunnya Standar Biaya Khusus (SBK) untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, setiap tahun.
- Terlaksananya pengembangan data dan informasi pada 20 unit kerja lingkup BPSDMP (data base, koneksi jaringan data dan informasi, website).
- terselesaikannya penyiapan program kerjasama (FEATI, READ) dengan lembaga donor (Bank Dunia, IFAD).

- terselesaikannya penyiapan dan pelaksanaan program kerjasama dengan sumber dana Counterpart Fund- Second Kennedy Round (CF-SKR).
- terselesaikannya laporan akhir Proyek Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K *Project Completion Review Mission*).

1.3.4.2. Aspek Keuangan dan Perlengkapan

- Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Badan PSDMP (Laporan SAK dan SIMAK BMN) setiap semester.
- Tersusunnya Laporan Barang Milik Negara dan Neraca Barang BPSDMP setiap semester.
- Tervalidasinya Laporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran satuan kerja lingkup BPSDMP setiap semester untuk seluruh satuan kerja BPSDMP.
- terselesaikannya inventarisasi dan penilaian BMN 93 Satuan Kerja lingkup BPSDMP (2 Satker Pusat, 20 Satker UPT, 28 Satker Dekonsentrasi, dan 43 Satker Tugas Pembantuan).
- Terbitnya sertifikat tanah untuk 3 lokasi (STPP Gowa, BPP Lampung, dan Mess BPSDMP).
- terselesaikannya dua aset bermasalah (Lahan praktek STPP Manokwari dan Lahan Kebun Praktek STPP Magelang di Karang Sari-Yogyakarta).
- Tersusunnya Penyempurnaan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan serta Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), setiap tahun.
- Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan lingkup BPSDMP.

1.3.4.3. Aspek Organisasi dan Kepegawaian

- Tersusunnya satu buku *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengelolaan 3M (*Man, Money and Material*).
- Tersusunnya formasi, *bezzetting* dan kebutuhan pegawai setiap tahun.
- Terlaksananya pengangkatan 401 orang tenaga honorer menjadi CPNS.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh 498 orang Pejabat Eselon III, IV dan pejabat fungsional lingkup BPSDMP.

1.3.4.4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan

- Terbitnya pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pedoman pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup BPSDMP setiap tahun.
- Terpublikasikan informasi program dan kegiatan BPSDMP melalui leaflet (2.000 eksemplar), majalah dinding, DVD (120 keping), siaran televisi (14 kali), konferensi pers (7 kali), kunjungan Pers (11 kali), dan pameran (18 kali).
- Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan BPSDMP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan BPSDMP setiap tahun.
- Terbentuknya 20 Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern lingkup BPSDMP.

1.3.5. Program Koordinatif

1.3.5.1. Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan Agropolitan merupakan program pemberdayaan masyarakat tani berbasis agribisnis melalui pendekatan

pengembangan kawasan yang ditangani Tim Nasional Pengembangan Agropolitan, yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah. Hasil yang telah dicapai oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai bagian dari Departemen Pertanian adalah sebagai berikut.

- Tersusunnya Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan yang disempurnakan.
- Terlaksananya pertemuan Pemantapan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diikuti oleh 3 Departemen terkait.
- Terlaksananya pembinaan kawasan Agropolitan di 33 Provinsi.

1.3.5.2. Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Program pengembangan agribisnis di LM3 merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan atau budaya dalam membina kegiatan agribisnis masyarakat di sekitarnya. Hasil yang telah dicapai oleh BPSDMP yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, menyiapkan SDM, dan penguatan jejaring kerjasama antar LM3 adalah sebagai berikut.

- Tersusun dan terdistribusikannya Pedoman Umum Pemberdayaan LM3.
- Tersusunnya Modul Pelatihan Pemberdayaan LM3.
- Tersusunnya profil & database LM3.
- Terselenggaranya Silaturahmi Nasional LM3 (tahun 2006 dan 2008).
- Terfasilitasinya pengembangan 60 LM3 menjadi LM3 Model.
- Terfasilitasinya pembentukan asosiasi dan kepengurusan LM3.

- Meningkatnya kompetensi 4.300 orang petugas pendamping dan 4.300 orang pengurus LM3 melalui pelatihan dan permagangan.

1.3.5.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

PUAP merupakan salah satu kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2008 di 10.000 desa di 33 provinsi. Komponen kegiatan terdiri dari pemberdayaan Gapoktan dan pemberian bantuan sosial untuk modal usaha bagi anggota Gapoktan. Badan Pengembangan SDM Pertanian bertanggung jawab pada koordinasi, penyiapan SDM dan pendampingan.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Terlaksananya rekrutmen dan peningkatan kompetensi 1.009 orang Penyelia Mitra Tani (PMT).
- Meningkatnya kompetensi 22.146 orang petugas melalui TOMT, TOT, dan Pelatihan Penyuluh Pendamping.
- Meningkatnya kompetensi 30.000 orang pengurus Gapoktan melalui pelatihan.
- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pengurus Gapoktan pengelola PUAP dari 33 provinsi.

1.3.6. Program dengan Dana PHLN

1.3.6.1. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi Informasi

Pertanian/ P3TIP (*Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information/ FEATI*)

P3TIP merupakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan penyuluhan pertanian yang berorientasi pasar, yang

dibangun berdasarkan kemitraan yang sejajar antara petani, pemerintah dan pihak swasta. Program ini dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 di 18 provinsi, 68 kabupaten, 3.080 desa, dengan jumlah total pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 92,8 juta. P3TIP memiliki lima komponen, tiga diantaranya dikelola oleh BPPSDMP, yaitu 1) penguatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani, 2) penguatan kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas aparat/petugas penyelenggara penyuluhan pertanian, serta 3) dukungan kebijakan penyuluhan dan penyelenggaraan program.

Melalui P3TIP, hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Terasilinasinya pembentukan 3.080 Unit Pengelola *Farmer Managed Extension Activities* (UP-FMA) dan terpilihnya 6.160 penyuluh swadaya.
- Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian melalui: (1) pelatihan teknis spesifik lokalita sebanyak 4.668 orang; (2) Pelatihan Manajemen Agribisnis bagi pelatih dan penyuluh pendamping sebanyak 1.086 orang; serta (3) Pelatihan Metodologi Penyuluhan Partisipatif dan fasilitasi FMA bagi pelatih dan penyuluh pendamping sebanyak 3.358 orang.
- Meningkatnya kompetensi 9.540 orang.pengelola UP-FMA.
- Meningkatnya kompetensi 6.360 orang penyuluh swadaya.
- Tersalurkannya dana hibah sebesar Rp.107 milyar dalam rangka pembelajaran agribisnis (FMA) bagi 243.989 orang petani.
- Terasilinasinya pembangunan 472 unit BPP baru dan rehabilitasi 109 unit gedung BPP lama.

1.3.6.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan Pertanian (*Rural Empowerment on Agriculture Development/ READ*)

Program READ merupakan program pemberdayaan masyarakat tani yang dibiayai dengan pinjaman IFAD sebesar SDR 14.30 juta atau sekitar USD 21.08 juta, dan dilaksanakan di lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Program READ efektif pada tanggal 19 November 2008. Realisasi kegiatan dimulai pada tahun anggaran 2009 dan akan berakhir pada tahun 2014. Program READ terdiri dari empat komponen, tiga di antaranya dikelola oleh BPSDMP, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) pengembangan usaha pertanian budidaya dan non budidaya, 3) pembangunan prasarana pedesaan.

Hasil yang telah dicapai melalui Program READ adalah sebagai berikut.

- Terfasilitasinya pembentukan 20 Unit Pengelola Dana Desa (UPDD).
- Terfasilitasinya pembentukan 180 kelompok (97 kelompok pria, 8 kelompok wanita, dan 75 kelompok campuran), dengan jumlah anggota 4.383 orang.
- Terfasilitasinya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pedesaan, yaitu: 1) jalan desa baru 11.3 km, 2) jalan desa direhabilitasi 3 km, 3) jalan usaha tani baru 60,9 km, 4) jaringan irigasi baru 8 ha, 5) saluran drainase baru 1.484 m, 6) sarana MCK 41 buah, 7) tanggul 2.650 m, serta 8) sarana air bersih 32 unit.

1.3.6.3. Kegiatan dengan Sumber Dana CF-SKR

Program pemberdayaan kelompok tani korban gempa dan pengembangan P4S yang didanai melalui bantuan hibah CF-SKR,

sebesar Rp. 24 milyar, dilaksanakan pada tahun 2006, 2008, dan 2009. Komponen kegiatan terdiri dari pelatihan, permagangan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan dan bantuan modal usahatani.

Hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- Meningkatnya kompetensi perencanaan usahatani bagi 960 pengurus kelompok tani korban gempa di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Jambi.
- Terfasilitasinya 960 kelompok tani untuk memperoleh dana bantuan modal usahatani dan non usahatani sejumlah Rp. 15,6 milyar.
- Meningkatnya kompetensi 180 orang instruktur, manager dan pengelola P4S melalui TOT.
- Meningkatnya kompetensi 120 orang pengelola P4S melalui magang.
- Meningkatnya kompetensi 1.800 orang petani melalui pelatihan di 30 P4S.
- Terfasilitasinya pengadaan sarana pelatihan bagi 30 P4S.
- Terfasilitasinya 1.800 orang petani dan pengelola P4S melalui bantuan penguatan modal sejumlah Rp. 3,4 milyar.

1.4. Permasalahan dan Tantangan

1.4.1. Permasalahan

Merujuk pada hasil-hasil yang dicapai pada periode 2005 - 2009, dan perkembangan lingkungan strategis yang sedang terjadi pada saat ini, maka teridentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan SDM pertanian adalah sebagai berikut.

1.4.1.1. Aspek Penyuluhan Pertanian

- Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, sehingga kualitas dan harga yang diterima petani masih relatif rendah.
- Rendahnya kemandirian petani dan lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi, dan informasi pasar.
- Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, baik sebagai kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan pelatihan /permagangan.
- Belum semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kelembagaan penyuluhan sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2006.
- Jumlah dan kompetensi penyuluh yang belum memadai untuk dapat mendukung empat sukses pembangunan pertanian, maupun untuk mengantisipasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Program penyuluhan yang disusun bersama instansi terkait dan pelaku utama belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan.
- Dukungan dana yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi oleh penyuluh pertanian di lapangan.

1.4.1.2. Aspek Pelatihan Pertanian

- Diklat Pimpinan belum dijadikan dasar dalam pengisian jabatan struktural di lingkup Kementerian Pertanian.
- Belum semua eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian memanfaatkan lembaga diklat pertanian dalam peningkatan kompetensi kerja aparatur pertanian.

- Jumlah dan kompetensi widyaiswara belum memadai untuk melaksanakan diklat teknis yang dibutuhkan oleh eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian.
- Sarana dan prasarana diklat pertanian belum memadai untuk melaksanakan diklat teknis dan kewirausahaan agribisnis.
- Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan di lembaga diklat pertanian sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang diusulkan oleh eselon I dan instansi terkait lingkup pertanian.

1.4.1.3 Aspek Pendidikan Pertanian

- Belum semua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memahami bahwa Diploma IV (D-IV) setara Strata 1 (S1).
- Kurangnya dukungan pemerintah daerah kepada penyuluh pertanian untuk mengikuti pendidikan di STPP.
- STPP yang merupakan perguruan tinggi kedinasan pertanian belum dapat melayani kebutuhan tenaga fungsional RIHP non penyuluh pertanian.
- Jumlah dan kompetensi dosen sekolah tinggi fungsional pertanian untuk bidang RIHP non penyuluh pertanian masih terbatas.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tinggi fungsional pertanian belum memadai.
- Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan pertanian di STPP dan sekolah tinggi fungsional pertanian lainnya masih sangat terbatas.
- Menurunnya minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- Jumlah dan kompetensi guru SPP belum memadai
- Sarana dan prasarana yang dimiliki SPP belum memadai.

- Tindak lanjut MOU antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pendidikan Nasional belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.

1.4.1.4. Aspek Administrasi dan Manajemen

- Mekanisme perencanaan dan revisi DIPA belum sesuai dengan sistem dan prosedur.
- Peraturan perundangan dan organisasi belum sepenuhnya tertangani dengan baik.
- Penanganan aset-aset yang bermasalah di lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian belum sepenuhnya terselesaikan.
- Penyampaian laporan bulanan kegiatan dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum berjalan dengan baik.
- Sistem Pengendalian Intern (SPI) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh unit satuan kerja lingkup BPSDMP.
- Penanganan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal belum terselesaikan dengan baik.

1.4.2. Tantangan

Disamping permasalahan mendasar, pengembangan SDM pertanian di masa mendatang juga menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut.

- Tuntutan perubahan terhadap pola pikir dan perilaku petani, dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.
- Meningkatnya tuntutan agar masyarakat tani bisa bersaing di pasar regional dan pasar global.
- Fenomena perubahan iklim dan isu kelestarian lingkungan hidup yang perlu diantisipasi.

- Adanya kebutuhan akan kelembagaan ekonomi pedesaan yang tangguh dan mandiri untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani.
- Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pertanian yang kompeten untuk mendukung pencapaian empat sukses pembangunan pertanian.
- Adanya keragaman kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan dan program pengembangan SDM pertanian.
- Reformasi birokrasi menuntut tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010, nomenklatur Badan Pengembangan SDM Pertanian berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

BPPSDMP memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta d) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode 2010-2014 adalah **“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.”**

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPPSDMP menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.
- 2) Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja.
- 3) Mengembangkan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel.
- 4) Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usahatani, dan pendapatan petani.
- 2) Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian.
- 3) Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten, serta sistem standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel.
- 4) Meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.

2.3.2. Sasaran

2.3.2.1. Penyuluhan Pertanian

- Penyelesaian lima Peraturan Presiden, dan tiga Peraturan Menteri Pertanian.
- Fasilitasi pembentukan 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.
- Fasilitasi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS dan 19.405 orang THL-TBPP.
- Penyelesaian 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer dan 24.608 THL-TBPP menjadi Penyuluh Pertanian PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
- Pemanfaatan 10.000 petani sukses menjadi penyuluh swadaya.
- Fasilitasi penumbuhan 20.000 Gapoktan dengan program pemberdayaan petani, dan pengembangan 300 Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani.
- Penetapan satu program penyuluhan pertanian nasional dan RKT yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender, setiap tahun.
- Penyediaan 1 dokumen data dan informasi mutakhir tentang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, serta ketenagaan penyuluh PNS dan swadaya.
- Penyediaan sistem informasi dan materi penyuluhan 7 subsektor melalui cyber extension.
- Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola petani di 67 kabupaten pada 19 provinsi sasaran FEATI

2.3.2.2. Pelatihan Pertanian

- Peningkatan eselonering 2 UPT Pelatihan Pusat, serta penataan 10 kelembagaan UPT Pelatihan Pusat dan 19 UPT Pelatihan Daerah.
- Penataan dan klasifikasi 708 kelembagaan P4S.
- Standarisasi sarana prasarana di 10 UPT Pelatihan Pertanian.
- Standarisasi, pemetaan spesialisasi dan peningkatan profesionalisme 290 widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan pada UPT pusat dan daerah.
- Pemetaan spesialisasi dan peningkatan kompetensi 2.100 instruktur P4S.
- Penerbitan 21 pedoman dan materi pelatihan mendukung empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
- Peningkatan kompetensi 108.855 orang aparatur melalui pelatihan pertanian yang mendukung reformasi birokrasi, empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender.
- Peningkatan kompetensi 97.814 orang non aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender.
- Penetapan 14 program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program instansi terkait.
- Fasilitasi 300 orang peserta dalam program kerjasama pelatihan internasional.
- Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian di 150 desa pada 5 kabupaten sasaran READ di Sulawesi Tengah.

2.3.2.3. Pendidikan Pertanian

- Penataan dan pengembangan kelembagaan dan program studi di STPP, dengan penambahan 5 program studi Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) non Pertanian dan 1 program studi perkarantinaan
- Peningkatan status kelembagaan 10 SPP menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan SBI.
- Peningkatan profesionalisme 600 guru dan 100 tenaga kependidikan di SPP/ SMK-SPP.
- Peningkatan profesionalisme 210 dosen dan 50 tenaga kependidikan di STPP.
- Penyediaan 15.000 lulusan SPP/SMK-SPP yang kompeten sebagai tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian.
- Penyediaan 2.460 sarjana sains terapan bidang penyuluh pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta perkarantinaan pertanian.
- Pemberian tugas belajar pendidikan pasca sarjana bagi 250 orang aparatur.
- Fasilitasi kesempatan mengikuti program *sister school* dan magang bagi 150 alumni SPP/SMK-SPP, serta pertukaran 15 siswa SPP/ SMK-SPP dalam rangka kerjasama teknis luar negeri.
- Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian.
- Tersedianya 300 asessor, verifikator dan perumus standar kompetensi nasional bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya.
- Akreditasi 7 UPT Pelatihan menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- Penyediaan 5.000 orang penyuluh pertanian yang memiliki sertifikat profesi.
- Penerbitan 30 SKKNI bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2.3.2.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- Penataan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan pusat dan 20 UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- Restrukturisasi program dan anggaran berbasis kinerja serta penyelesaian dokumen perencanaan dan kerjasama untuk 130 satuan kerja lingkup BPPSDMP.
- Revitalisasi pengelolaan anggaran dan barang milik negara dalam mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 130 satuan kerja lingkup BPPSDMP.
- Optimalisasi pelaksanaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih pada 130 satuan kerja lingkup BPPSDMP.
- Peningkatan efektifitas kehumasan dan ketatausahaan dalam rangka peningkatan citra BPPSDMP.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA INDIKATOR

3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 difokuskan dalam mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu:

- 1) terwujudnya swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- 2) peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
- 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan, adalah sebagai berikut.

- 1) Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.
- 2) Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta.
- 3) Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan.

- 4) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
- 5) Pendidikan tinggi kedinasan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina.
- 6) Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
- 7) Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional.
- 8) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

3.2. Strategi

Mengacu pada tujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah sebagai berikut.

- 1) Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.
- 2) Penataan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani.
- 3) Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
- 4) Penguatan dan pengembangan lembaga pelatihan pertanian swadaya (P4S) sebagai pusat pelatihan dan permagangan bidang agribisnis bagi masyarakat tani.

- 5) Penumbuhan wirausahawan muda di bidang agribisnis dilakukan melalui *agri-training camp*, magang, pelatihan kewirausahaan pertanian, dan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
- 6) Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian kedinasan.
- 7) Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi.
- 8) Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah.
- 9) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang penyuluhan serta teknis dan kewirausahaan agribisnis.
- 10) Pemantapan dan pengembangan tata kelola administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

Untuk melaksanakan strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pada periode 2010-2014, telah ditetapkan program dengan nomenklatur “**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani**”.

3.3.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Implementasi dari program BPPSDMP tersebut dilakukan melalui empat kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
- 2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.
- 3) Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian.
- 4) Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian.
- 5) Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.3.2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian meliputi: penataan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani, serta pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian.

3.3.2.1.1. Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Pengawasan penerbitan peraturan perundang-undangan penyuluhan pertanian.
- Penataan Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan, sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006.
- Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.
- Perencanaan ketenagaan penyuluh pertanian, serta fasilitasi penyelesaian Penyuluh Pertanian Honorer dan THL-TB PP.
- Identifikasi dan penetapan petani sukses menjadi penyuluh swadaya.

3.3.2.1.2. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

- Fasilitasi penumbuhan Gapoktan melalui program pemberdayaan masyarakat tani dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.

3.3.2.1.3. Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan program penyuluhan pertanian nasional mendukung empat sukses pembangunan pertanian, serta mengantisipasi perubahan lingkungan dan kelestarian lingkungan.
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
- Pengembangan *cyber extension* untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3.3.2.2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian meliputi: pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian, peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian, peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian, serta pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian.

3.3.2.2.1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- Penataan dan akreditasi UPT Pelatihan Pusat dan Daerah.
- Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S.
- Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan.

3.3.2.2.2. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

- Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan.
- Peningkatan kompetensi instruktur P4S.

3.3.2.2.3. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

- Pengembangan pedoman dan materi pelatihan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, serta mengantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
- Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh,

pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja.

- Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya.

3.3.2.2.4. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengiriman widyaiswara/tenaga ahli serta penyelenggaraan pelatihan/permagangan pertanian dalam kerangka kerjasama luar negeri.

3.3.2.3. Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

Kegiatan revitalisasi sistem pendidikan serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian meliputi: penataan kelembagaan pendidikan pertanian, peningkatan ketenagaan pendidikan pertanian, peningkatan penyelenggaraan pendidikan pertanian, pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian, serta pengembangan standar dan sertifikasi profesi.

3.3.2.3.1. Penataan Kelembagaan Pendidikan

- Akreditasi STPP serta penataan dan pengembangan program studi di STPP.
- Pengembangan SPP menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan SBI.

- 3.3.2.3.2. Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Pertanian
- Standarisasi guru dan tenaga kependidikan SPP dan SMK/SPP-RSBI/SBI.
 - Standarisasi dosen STPP.
- 3.3.2.3.3. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian
- Penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta Perkarantinaan Pertanian.
 - Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP/ SMK-SPP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 3.3.2.3.4. Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian
- Fasilitasi pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur pertanian.
 - Fasilitasi program pertukaran siswa dan permagangan alumni SPP dalam kerangka kerjasama teknis luar negeri di bidang pendidikan pertanian.
- 3.3.2.3.5. Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi
- Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian.
 - Fasilitasi pelatihan calon asesor bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya.
 - Pemetaan dan pengembangan UPT Pelatihan BPPSDMP untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian.

- Penyusunan SKKNI bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja internasional.

3.3.2.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- 3.3.2.4.1. Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian
- Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup BPPSDMP.
- 3.3.2.4.2. Pemantapan Sistem Perencanaan
- Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- 3.3.2.4.3. Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
- Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- 3.3.2.4.4. Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - Pengelolaan kehumasan dan ketatausahaan.

3.4. Kegiatan dan Indikator

Seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga di akhir periode 2010-2014, diharapkan semua target program dan kegiatan tersebut dapat dicapai. Secara rinci kegiatan, indikator output, dan outcome kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kegiatan, Indikator Output, dan Outcome Kegiatan PSDMP

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian		Penyelenggaraan penyuluhan berjalan dengan baik
1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		
1.1.1.	Pengawasan penerbitan peraturan perundang-undangan penyuluhan pertanian.	Terbitnya 5 Peraturan Presiden dan 3 Peraturan Menteri Pertanian sebagai Dasar Hukum Penataan kelembagaan Penyuluhan Pertanian dari Tingkat Provinsi sampai dengan Kecamatan.	Termotivasinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, serta meningkatkannya etos kerja dan kesejahteraan penyuluh pertanian
1.1.2.	Penataan Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan, sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2006.	Terfasilitasinya Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 di 19 Provinsi (Bakorluh), 200 Kab/Kota (Bapelluh), dan 500 Kecamatan (Balai Penyuluhan Kecamatan); serta pengembangan 522 BPP Model.	Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota berjalan efektif dan efisien.
1.1.3.	Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.	Terbentuknya 28.304 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.	Meningkatnya pelayanan penyuluhan kepada petani dan pelaku usaha dalam pengembangan agribisnis di perdesaan.

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
1.1.4.	Perencanaan ketenagaan penyuluh pertanian, dan fasilitasi penyelesaian Penyuluh Pertanian Honoror, dan THL-TB PP.	Tersedianya BOP bagi 27.922 penyuluh PNS dan Honor+BOP 19.405 THL-TBPP, serta terselesaikannya pengangkatan 1.237 orang tenaga penyuluh honoror dan 24.608 THL-TBPP menjadi PNS dan pegawai tetap.	Meningkatnya motivasi kerja penyuluh dalam melaksanakan pendampingan bagi petani dan pelaku usaha pertanian
1.1.5.	Identifikasi dan penetapan petani sukses menjadi penyuluh swadaya.	Ditetapkannya 10.000 penyuluh swadaya.	Terpenuhinya tenaga penyuluh di pedesaan dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian
1.2.	Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani		
1.2.1.	Fasilitasi penumbuhan Gapoktan melalui program pemberdayaan masyarakat tani, dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya 20.000 Gapoktan melalui program pemberdayaan petani; • Berkembangnya 300 Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan. 	Berkembangnya usaha agribisnis, serta meningkatnya pendapatan masyarakat tani dan kesempatan kerja di perdesaan.
1.3.	Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian		
1.3.1.	Pengembangan program penyuluhan pertanian nasional mendukung empat sukses pembangunan pertanian.	Tersedianya program penyuluhan pertanian nasional dan RKT yang mendukung 4 sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender.	Meningkatnya koordinasi antar kelembagaan penyuluhan pertanian dengan kelembagaan lainnya dalam mendukung empat sukses pembangunan pertanian yang antisipatif terhadap perubahan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender.

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
1.3.2.	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.	Tersedianya 1 dokumen data dan informasi mutakhir mengenai kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh PNS, swadaya setiap tahun	Meningkatnya kualitas perencanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
1.3.3.	Pengembangan <i>cyber extension</i>	Tersedianya sistem informasi dan materi penyuluhan 7 subsektor yang disebar-luaskan pertanian melalui cyber extension.	Meningkatnya aksesibilitas penyuluh pertanian terhadap informasi pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada petani dan pelaku usaha pertanian.
1.3.4.	Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola petani (FEATI Project)	Terlaksananya kegiatan penyuluhan yang dikelola petani di 68 kabupaten pada 9 provinsi sasaran FEATI	Meningkatnya kemandirian petani dalam menyelenggarakan penyuluhan
2.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		Meningkatnya kompetensi kerja SDM pertanian
2.1.	Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian		
2.1.1	Penataan dan akreditasi UPT pelatihan pusat dan daerah	Peningkatan eselonering 2 UPT Pusat, serta tertatanya kelembagaan 10 UPT pelatihan pusat dan 19 UPT pelatihan daerah	Meningkatnya kredibilitas kelembagaan pelatihan pertanian
2.1.2.	Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S	Tertatanya dan terklasifikasinya 708 kelembagaan P4S	Meningkatnya kredibilitas kelembagaan P4S
2.1.3.	Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada 10 UPT pelatihan pusat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian pada UPT pelatihan pusat

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
2.2.	Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian		
2.2.1.	Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan	Meningkatnya profesionalisme 290 widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan pada UPT Pelatihan pusat dan daerah	Meningkatnya kredibilitas widyaiswara & tenaga teknis kediklatan
2.2.2.	Peningkatan kompetensi instruktur P4S	Meningkatnya kompetensi 2.100 orang instruktur P4S	Meningkatnya kredibilitas instruktur P4S
2.3.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian		
2.3.1.	Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi	Tersedianya 21 pedoman dan materi (modul) pelatihan pertanian	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian
2.3.2.	Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian	Terselenggaranya pelatihan bagi 108.855 orang penyuluh PNS, RIHP non Penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian	Meningkatnya kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima mendukung empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi
2.3.3.	Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lain	Terselenggaranya pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi 97.814 orang penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya	Meningkatnya kapasitas petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan agribisnis

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
2.4.	Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan		
2.4.	Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan		
2.4.1.	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah	Tersusunnya 14 program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program instansi terkait, setiap tahun	Meningkatnya pelatihan pertanian sesuai dengan kebutuhan stakeholder
2.4.2.	Pengiriman widyaiswara/tenaga ahli serta penyelenggaraan pelatihan/permagangan pertanian dalam kerangka kerjasama luar negeri	Terselenggaranya pengiriman widyaiswara/tenaga ahli, dan pelatihan/ permagangan bertaraf internasional bagi 300 orang peserta	Meningkatnya kredibilitas Pemerintah R.I. di dunia Internasional
2.4.3.	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian di 150 desa sasaran READ pada 5 kabupaten di Sulawesi Tengah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemandirian petani di 5 kabupaten di Sulawesi Tengah.
3.	Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian		Meningkatnya jumlah dan profesionalisme aparat fungsional RIHP, tenaga teknis menengah, wirausahawan muda dan SDM pertanian lainnya
3.1.	Penataan Kelembagaan Pendidikan		
3.1.1.	Akreditasi STPP serta penataan dan pengembangan program studi di STPP	Ditetapkan/ ditetapkan ulang peringkat akreditasi STPP oleh BAN; serta ditetapkannya penyelenggaraan 6 program studi baru di STPP (RIHP non penyuluhan dan perkarantina)	Meningkatnya kredibilitas dan ketersediaan lembaga pendidikan tinggi kedinasan pertanian bagi calon pejabat fungsional RIHP dan Karantina

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
3.1.2.	Pengembangan SPP menjadi SMK-SPP bertaraf internasional	Meningkatnya status kelembagaan 10 SPP menjadi SMK-SPP RSBI dan SBI	Meningkatnya kredibilitas SPP untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berwawasan global
3.2.	Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Pertanian		
3.2.	Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Pertanian		
3.2.1.	Standarisasi guru dan tenaga kependidikan SPP dan SMK-SPP	Terstandarisasi dan meningkatnya profesionalisme 600 guru dan 100 tenaga kependidikan di SPP dan SMK-SPP	Meningkatnya kredibilitas guru dan tenaga kependidikan di SPP dan SMK-SPP
3.2.2.	Standarisasi dosen dan tenaga kependidikan STPP, STFP, dan STFKP	Terstandarisasi dan meningkatnya profesionalisme 210 dosen dan 50 tenaga kependidikan di sekolah tinggi kedinasan pertanian	Meningkatnya kredibilitas dosen, dan tenaga kependidikan di sekolah tinggi kedinasan pertanian
3.3	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan		
3.3.1.	Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP dan SMK-SPP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Tersedianya 15.000 lulusan SPP dan SMK-SPP yang kompeten sebagai tenaga teknis tingkat menengah dan calon wirausahawan muda pertanian	Meningkatnya jumlah wirausahawan muda dan tenaga teknis menengah bagi dunia usaha/industri pertanian

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
3.3.2.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta Perkarantina Pertanian	Tersedianya 2.460 Sarjana Sain Terapan lulusan sekolah tinggi kedinasan pertanian	Meningkatnya jumlah tenaga fungsional penyuluh pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta karantina pertanian yang kompeten
3.4.	Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian		
3.4.1.	Fasilitasi pendidikan program pascasarjana bagi aparatur pertanian	Terfasilitasinya 250 aparatur pertanian yang diberi tugas belajar program S2/S3	Meningkatnya kualifikasi pendidikan aparat pertanian
3.4.2.	Fasilitasi program pertukaran siswa dan permagangan alumni SPP dalam kerangka kerjasama teknis luar negeri di bidang pendidikan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya 15 siswa SPP untuk mengikuti program pertukaran siswa di sekolah pertanian Gunma Jepang, dan • Terfasilitasinya 150 lulusan SPP untuk mengikuti program sister school dan magang di perusahaan agribisnis di luar negeri 	Meningkatnya wawasan, etos kerja dan daya saing siswa dan alumni SPP
3.5.	Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi		
3.5.1	Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian	Terbentuknya LSP bidang pertanian non penyuluhan pertanian	Meningkatnya SDM pertanian yang tersertifikasi
3.5.2.	Fasilitasi pelatihan calon asessor bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya	Terlatihnya 300 calon asessor, verifikator dan perumus standar kompetensi bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya	Meningkatnya kesiapan pelaksanaan sertifikasi profesi penyuluh pertanian dan bidang pertanian lainnya

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
3.5.3.	Pemetaan dan pengembangan UPT Pelatihan BPPSDMP untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya satu dokumen peta potensi UPT BPPSDMP untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) • Terfasilitasinya tujuh UPT Pelatihan BPPSDMP menjadi LDP dan TUK 	Meningkatnya ketersediaan Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), bagi profesi penyuluh pertanian dan profesi pertanian lainnya
3.5.5.	Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian	Terlaksananya sertifikasi profesi 5.000 penyuluh pertanian	Meningkatnya etos kerja dan kesejahteraan penyuluh pertanian
3.5.6	Penyusunan SKKNI bidang pertanian dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja di tingkat internasional	Ditetapkannya 30 SKKNI untuk aparatur pertanian dan non aparatur pertanian berdasarkan Keputusan Menakertrans	Meningkatnya profesionalisme SDM pertanian sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya		Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya pemerintah yang bersih dan tatakelola pemerintahan yang baik
4.1.	Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian		
4.1.1.	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup BPPSDMP	Terselesaikannya 1.000 Produk hukum, 20 unit organisasi, dan 5.325 dokumen administrasi kepegawaian untuk BPPSDMP pusat dan 20 UPT BPPSDMP.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang prima

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
4.2.	Pemantapan Sistem Perencanaan		
4.2.1.	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Tersusunnya 2 paket dokumen data dan informasi, 2 dokumen kerjasama program, 55 SRAA dan 75 DIPA Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun sesuai standar yang ditentukan	Meningkatnya sistem perencanaan program, kegiatan dan anggaran PPSDMP
4.3.	Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan		
4.3.1	Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup BPPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya 5 laporan SAI lingkup BPPSDMP yang Berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) • terselesaikannya aset bermasalah di 7 UPT 	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan perlengkapan
4.4.	Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		
4.4.	Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		
4.4.1.	Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Terselesaikannya 90% LHP di 20 unit Satker Pusat dan UPT • Berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di 20 unit Satker Pusat dan UPT • Terlaksananya monitoring dan evaluasi program BPPSDMP di 130 satker 	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP
4.4.2.	Pengelolaan kehumasan dan ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya 75 materi kehumasan yang dipublikasikan • Terselenggaranya urusan ketatausahaan lingkup 	Meningkatnya citra BPPSDMP

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	
		OUTPUT	OUTCOME
		BPPSDMP	

Secara lengkap, rencana tindak kegiatan BPPSDMP tahun 2010–2014 disajikan pada lampiran.



BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2010–2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendidikan serta standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, disusun dengan mengacu pada: 1) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2005 – 2009, 2) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan 3) Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010–2014.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan kesejahteraan petani; dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi birokrasi.

Untuk mengimplementasikan dengan baik Renstra BPPSDMP tersebut, setiap eselon II dan UPT lingkup BPPSDMP perlu menyusun Renstra masing - masing unit yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi yang lebih rinci dengan mengacu kepada Renstra BPPSDMP. Renstra dari masing - masing unit kerja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPPSDMP dalam upaya mewujudkan visi dan misi BPPSDMP.

Selain itu, Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014 juga menjadi acuan bagi kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana kegiatan masing-masing kelembagaan tersebut, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Lampiran 1. Kegiatan, Sub Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target dan Anggaran Kegiatan PSDMP Tahun 2010-2014

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian								714,44	793,32	690,47	746,52	821,17
1.1	Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian												
1.1.1	Pengawasan penerbitan peraturan perundang-undangan penyuluhan pertanian.	Penyelesaian lima Peraturan Presiden, dan tiga Peraturan Menteri Pertanian sebagai Dasar Hukum Penataan kelembagaan Penyuluhan Pertanian dari Tingkat Provinsi sampai dengan Kecamatan.	Jumlah Peraturan Presiden	3	2	-	-	-					
			Jumlah Peraturan Menteri Pertanian	2	1	-	-	-					
1.1.2	Penataan Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, dan Balai Penyuluhan Kecamatan, sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2006.	Fasilitasi pembentukan 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, dan 500 Balai Penyuluhan Kecamatan	Jumlah Bakorluh sesuai UU No.16 Tahun 2006	3	4	5	5	2					
			Jumlah Bapelluh sesuai UU No.16 Tahun 2006	30	40	50	50	30					
			Jumlah Balai Penyuluhan Kec	50	100	150	100	100					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
			Jumlah kumulatif BPP Model yang dikembangkan.	303	353	403	453	522					
1.1.3	Penataan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/Kelurahan.	Fasilitasi pembentukan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.	Jumlah Posluhdes yang terbentuk	2.500	6.000	6.804	6.500	6.500					
1.1.4.	Perencanaan ketenagaan penyuluh pertanian, dan fasilitasi penyelesaian Penyuluh Pertanian Honorer, dan THL-TB PP.	Fasilitasi 27.922 penyuluh PNS dan 19.405 THL-TBPP; serta penyelesaian 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer dan 24.608 THL-TB PP menjadi Penyuluh Pertanian PNS dan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah penyuluh PNS yang mendapat BOP	27.430	27.922	32.456	38.151	43.927					
			Jumlah THL-TBPP yang diberi honor dan BOP	24.608	19.045	9.449	-	-					
			Jumlah penyuluh honorer yang diangkat menjadi PNS dan pegawai tidak tetap.	-	1.237	-	-	-					
			Jumlah THL-TBPP yang diangkat menjadi PNS dan Pegawai Tidak Tetap.	-	5.503	9.596	9.707	-					
1.1.5.	Identifikasi dan penetapan petani sukses menjadi penyuluh swadaya.	Pemanfaatan 10.000 petani sukses menjadi penyuluh swadaya	Jumlah petani maju yang ditetapkan menjadi penyuluh swadaya.	-	2.500	3.000	3.000	1.500					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)					
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	
1.2.	Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani													
1.2.1.	Fasilitasi penumbuhan Gapoktan melalui program pemberdayaan masyarakat tani, dan pengembangan Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.	Fasilitasi penumbuhan 20.000 Gapoktan dengan program pemberdayaan petani, dan pengembangan 300 Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani	Jumlah Gapoktan yang tumbuh melalui program pemberdayaan petani	10.000	10.000	-	-	-						
			Jumlah Gapoktan yang menjadi kelembagaan ekonomi perdesaan.	25	50	100	75	50						
1.3.	Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian													
1.3.1	Pengembangan program penyuluhan pertanian nasional mendukung empat sukses pembangunan pertanian.	Penetapan satu program penyuluhan pertanian nasional yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, serta responsif gender, setiap tahun	Jumlah program penyuluhan pertanian nasional dan RKT yang ditetapkan setiap tahun	1	1	1	1	1						

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)					
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	
1.3.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.	Penyediaan data dan informasi mutakhir mengenai kelembagaan petani, serta ketenagaan penyuluh PNS, swadaya	Jumlah dokumen data dan informasi, setiap tahun	1	1	1	1	1						
1.3.3	Pengembangan <i>cyber extension</i>	Penyediaan sistem informasi dan materi penyuluhan pertanian untuk 7 subsektor melalui cyber extension	Jumlah materi penyuluhan subsektor yang disebarluaskan melalui cyber extension	6	7	7	7	7						
1.3.4	Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola petani	Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola petani di 68 kabupaten pada 9 provinsi sasaran FEATI	Jumlah kabupaten FEATI yang melaksanakan penyuluhan yang dikelola petani	68	68	68	-	-						
2.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian								238,65	263,23	367,10	386,61	398,79	
2.1.	Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian													
2.1.1	Penataan dan akreditasi UPT pelatihan pusat dan daerah	Peningkatan eselonering 2 UPT Pelatihan Pusat; serta penataan 10 kelembagaan UPT Pelatihan Pusat dan 19 UPT Pelatihan Daerah	Jumlah UPT pelatihan yang meningkat eseloneringnya.	-	-	-	-	2						

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
			Jumlah UPT pelatihan pusat yang tertata kelembagaannya	10	10	10	10	10					
			Jumlah UPT pelatihan daerah yang tertata kelembagaannya	-	-	19	19	19					
2.1.2.	Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S	Penataan dan klasifikasi 708 kelembagaan P4S	Jumlah kelembagaan P4S yang tertata dan terklasifikasi	40	170	170	170	158					
2.1.3.	Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan	Standarisasi sarana prasarana di 10 UPT Pelatihan.	Jumlah UPT pelatihan pusat yang dilengkapi sarana dan prasarananya	-	10	10	10	10					
2.2.	Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian												
2.2.1.	Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan	standarisasi, pemetaan spesialisasi dan peningkatan profesionalisme 290 widyaiswara dan 790 tenaga teknis kediklatan pada UPT Pelatihan pusat dan daerah	Jumlah widyaiswara yang ditingkatkan profesionalismenya	22	58	70	70	70					
			jumlah tenaga teknis kediklatan yang ditingkatkan profesionalismenya	-	190	200	200	200					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
2.2.2.	Peningkatan kompetensi instruktur P4S	pemetaan spesialisasi dan peningkatan kompetensi 2.100 instruktur P4S	Jumlah instruktur P4S yang ditingkatkan kompetensinya	-	520	520	520	540					
2.3.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian												
2.3.1	Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi	Penerbitan 21 pedoman dan materi pelatihan untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi	Jumlah pedoman dan materi (modul) pelatihan pertanian	6	4	4	4	3					
2.3.2	Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja	Peningkatan kompetensi 108.855 orang aparatur melalui pelatihan pertanian yang mendukung reformasi birokrasi, empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	15.270	17.370	23.100	25.050	28.035					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
2.3.3	Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya	Peningkatan kompetensi 97.814 orang non aparatur melalui pelatihan dan permagangan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian, antisipatif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, serta responsif gender	Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan permagangan	15.840	15.990	19.980	21.990	24.014					
2.4.	Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan												
2.4.1	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah	Penetapan 14 program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program instansi terkait, setiap tahun	Jumlah program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program instansi terkait	14	14	14	14	14					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
2.4.2.	Pengiriman widyaiswara/ tenaga ahli serta penyelenggaraan pelatihan/permagangan pertanian dalam kerangka kerjasama luar negeri	Fasilitasi 300 orang peserta dalam program kerjasama pelatihan internasional	Jumlah widyaiswara/tenaga ahli dan peserta latihan/ permagangan dalam kerangka kerjasama luar negeri	33	60	65	70	72					
2.4.3	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian melalui READ Prrogram	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian di 150 desa pada 5 kabupaten READ di Sulawesi Tengah	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertaniannya	30	30	30	30	30					
3.	Revitalisasi Sistem Pendidikan, serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian								154,28	154,35	240,51	264,54	277,76
3.1.	Penataan Kelembagaan Pendidikan												
3.1.1	Akreditasi dan penataan kelembagaan serta pengembangan program studi di STPP	Penataan & pengembangan kelembagaan serta penambahan 5 program studi RIHP non penyuluhan dan 1 program studi perkarantina di STPP	Jumlah STPP yang ditetapkan/ ditetapkan ulang akreditasinya oleh BAN	-	-	2	2	2					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
3.1.2	Pengembangan SPP menjadi SMK-SPP RSBI dan SBI	Peningkatan status kelembagaan 10 SPP/ SMK-SPP menjadi RSBI dan SBI	Jumlah program studi baru yang diselenggarakan di STPP	-	-	6	-	-					
			Jumlah kelembagaan SPP yang ditetapkan sebagai SMK-SPP RSBI dan SBI	8 RSBI	2 RSBI	-	2 SBI	2 SBI					
3.2.	Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Pertanian												
3.2.1	Standarisasi guru dan tenaga kependidikan SPP/ SMK-SPP	Peningkatan profesionalisme 600 guru dan 100 tenaga kependidikan di SPP/ SMK-SPP	Jumlah guru yang ditingkatkan profesionalismenya dan distandarisasi	60	90	150	150	150					
			Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan profesionalismenya	-	25	25	25	25					
3.2.2	Standarisasi dosen dan tenaga kependidikan STPP	Peningkatan profesionalisme 210 dosen dan 50 tenaga kependidikan di sekolah tinggi kedinasan pertanian	Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya dan distandarisasi	-	30	60	60	60					
			Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan profesionalismenya	-	-	25	25	-					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)					
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	
3.3	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan													
3.3.1	Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP/SMK-SPP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Penyediaan 15.000 lulusan SPP/ SMK-SPP yang kompeten sebagai tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda pertanian	Jumlah lulusan SPP/ SMK-SPP	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
3.3.2	Penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta Perkarantinaan Pertanian	Penyediaan 2.460 Sarjana Sain Terapan bidang penyuluhan pertanian dan RIHP non penyuluh pertanian serta perkarantinaan pertanian	Jumlah lulusan sekolah tinggi kedinasan pertanian	210	350	500	700	700						
3.4.	Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian													
3.4.1	Fasilitasi pendidikan program pascasarjana bagi aparatur pertanian	Pemberian Tugas Belajar pendidikan pasca sarjana bagi 250 orang aparatur	Jumlah aparatur pertanian yang diberi tugas belajar program S2/S3	100	150	200								

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
3.4.2	Fasilitasi program pertukaran siswa dan permagangan alumni SPP/ SMK-SPP dalam kerangka kerjasama teknis luar negeri di bidang pendidikan pertanian	Fasilitasi kesempatan magang bagi 150 alumni SPP/ SMK-SPP dan program pertukaran 15 siswa SPP/SMK-SPP dalam rangka kerjasama teknis luar negeri	Jumlah lulusan SPP/ SMK-SPP yang mengikuti program sister school dan magang di perusahaan agribisnis di luar negeri	-	25	25	40	60					
			Jumlah siswa SPP/SMK-SPP yang mengikuti program pertukaran siswa di sekolah pertanian Gunma Jepang	3	3	3	3	3					
3.5.	Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi												
3.5.1	Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian non penyuluhan pertanian.	Jumlah LSP bidang pertanian non penyuluhan pertanian yang terbentuk										
3.5.2	Fasilitasi pelatihan calon asesor bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya	Tersedianya 300 asesor bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya.	Jumlah calon asesor, verifikator dan perumus standar kompetensi bidang penyuluhan pertanian dan bidang pertanian lainnya yang ada	60	60	60	60	60					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
3.5.3	Pemetaan dan pengembangan UPT Pelatihan BPPSDMP untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).	Terakreditasinya 7 UPT Pelatihan menjadi Lembaga Diklat Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Jumlah dokumen peta potensi UPT BPPSDMP sebagai Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	1	1	1	1					
			Jumlah UPT Pelatihan BPPSDMP yang difasilitasi untuk menjadi LDP dan TUK	-	2	2	2	1					
3.5.5	Fasilitasi sertifikasi profesi penyuluh pertanian	Penyediaan 5.000 orang penyuluh pertanian yang memiliki sertifikat profesi	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi	-	1.000	1.000	1.000	2.000					
3.5.6	Penyusunan SKKNI bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja di tingkat internasional	Penerbitan 30 SKKNI bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)	Jumlah SKKNI untuk aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menakertrans	3	6	7	7	7					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya								54,42	54,44	70,75	77,81	82,94
4.1.	Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian												
4.1.1	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup BPPSDMP	Penataan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan pusat dan 20 UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Jumlah produk hukum yang terselesaikan	250	250	250	250	250					
			Jumlah unit organisasi dan kelembagaan BPPSDMP yang terselesaikan ketetapannya	1	19	1	-	-					
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang terselesaikan	1.100	1.050	1.050	1.050	1.075					

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)					
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	
4.2.	Pemantapan Sistem Perencanaan													
4.2.1	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, & Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Restrukturisasi program dan anggaran berbasis kinerja untuk 130 Satuan kerja lingkup BPPSDMP, setiap tahun	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	2	2	2	2	2						
Jumlah dokumen kerjasama program yang terselesaikan			2	2	2	2	2							
Jumlah SRAA yang terselesaikan			55	55	55	55	55							
Jumlah DIPA Satker lingkup BPPSDMP yang terselesaikan			75	75	26	26	21							
4.3.	Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan													
4.3.1	Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup BPPSDMP	Revitalisasi pengelolaan anggaran dan barang milik negara dalam mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setiap tahun	Jumlah Laporan SAI lingkup BPPSDMP yang tersusun dan mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1	1	1	1	1						

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ANGGARAN (Rp.milyar)				
				10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
4.4.	Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah UPT yang terselesaikan masalah asetnya	2	2	2	1	-					
		4.4.1	Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih	Persentase jumlah LHP Satker Pusat dan UPT yang terselesaikan	50%	60%	70%	80%	90%			
			Jumlah unit kerja pusat dan UPT yang Sistem Pengendalian Intern (SPI) nya berjalan dan berfungsi baik	10	20	20	20	20					
			Jumlah satuan kerja BPPSDMP yang termonitor dan terevaluasi kegiatannya	130	130	26	26	21					
4.4.2	Pengelolaan kehumasan dan ketatausahaan	Peningkatan efektifitas kehumasan dan ketatausahaan dalam rangka perbaikan citra BPPSDMP	Jumlah materi kehumasan yang dipublikasikan	75	75	75	75	75					
			Jumlah surat menyurat yang dikelola	22.600	22.700	22.800	22.900	23.000					

